

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerapan Peraturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah. Bahwa dalam UU Nomor 9 Tahun 2015 menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, membawa pemerintah daerah untuk melakukan manajemen pemerintahannya, khususnya dalam hal keuangan pada masing-masing daerah. Sistem ini nantinya akan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib dan taat pada peraturan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.

Menyadari akan tanggung jawab yang dibebankan oleh undang-undang untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri, maka pemerintah daerah sekarang ini

dihadapkan oleh banyaknya tuntutan baik dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal dan segi eksternal yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki agar Pemerintah Daerah mampu menciptakan tujuan masyarakat daerah yang sejahtera sebagai suatu implikasi dari penerapan otonomi daerah yang mengedepankan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan publik.

Tuntutan akuntabilitas publik terkait dengan perlunya transparansi dan pemberian informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Kita ketahui bahwa akuntabilitas pemerintahan menjadi fokus utama masyarakat karena akuntabilitas dapat mencegah terjadinya praktek korupsi seperti yang terjadi, karena itu mengharuskan lembaga-lembaga publik membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak luar.

Anggaran publik selalu dikaitkan dengan akuntabilitas eksekutif organisasi. Konflik yang terjadi dalam penentuan anggaran sangat berpengaruh terhadap kapabilitas eksekutif organisasi untuk mengendalikan pengeluaran. Proses penyusunan anggaran maupun pengesahan anggaran dapat dipublikasikan ke masyarakat. Tujuan anggaran dapat dirumuskan sebagai alat akuntabilitas, alat manajemen dan instrument kebijakan ekonomi. Sehingga jelas bahwa implementasi kebijakan anggaran yang baik akan meningkatkan akuntabilitas publik.

Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan suatu pengelolaan penganggaran kepegawaian yang baik melalui proses Fungsi anggaran sebagai alat kebijakan fiskal maksudnya digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui laporan realisasi anggaran belanja daerah, akan dilihat apakah

anggaran yang telah dibuat untuk program dan kegiatan pemerintah telah di implementasikan dengan baik dan dapat berperan sebagai alat kebijakan fiskal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dinas Pendidikan Kota Bandung merupakan sebuah lembaga pemerintah yang di dalam mengelola keuangan selalu mengacu kepada kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan anggaran. Namun, Selama dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung tidak dapat terhindarkan ketidaksesuaian antara serapan anggaran dengan anggaran yang telah ditetapkan bahkan ada beberapa program atau kegiatan yang tidak terlaksana. Walaupun dalam penyusunan anggarannya telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada, tapi masih saja belum dikatakan secara efektif.

Hal tersebut terbukti dari adanya fenomena-fenomena akuntabilitas publik yang menjadi penyebab permasalahan tidak terlaksananya program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Bandung berdasarkan Renja (Rencana Kerja) APBD tahun 2017 yaitu, keterbatasan data dan informasi; belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia; belum optimalnya koordinasi; belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/ kegiatan; perlu peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra (Rencana Strategi), RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), maupun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dalam merencanakan kegiatan. Selain dari fenomena-fenomena

tersebut, Adapun realisasi perprogram yang dapat dilihat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kota Bandung pada gambar 1.1 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Capaian Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2017

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	31.807.294.79,5	24.813.093,07	<u>82.11</u>
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	102.955.859.943	78.498.432.000	<u>76.24</u>
3	Program Pendidikan Menengah	5.525.840.00	4.343.966,00	<u>90.39</u>
4	Program Pendidikan Nonformal	4.389.841.781	3.645.610.090	<u>83.05</u>
5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.832.366.700	2.063.185.600	<u>35.37</u>
6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	7.314.657.478	3.351.108.022	<u>45.81</u>
7	Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis	112.718.556.529.26	39.722.432.947	<u>35.24</u>
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.778.344.306.24	2.898.346.428	<u>76.71</u>
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.786.161.131	1.573.479.666	<u>32.88</u>
10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.269.873.300	1.003.538.150	<u>79.03</u>
11	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	633.984.205	400.941.731	<u>63.24</u>
12	Program Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN untuk SD, SDLB Negeri dan SMP, SMPLB Negeri	728.082.880	151.737.400	<u>20.84</u>
Jumlah		248.141.041.733	134.897.240.341	<u>54,36</u>

Sumber: LKIP Dinas Pendidikan Kota Bandung, diperoleh November Tahun 2018.

Berdasarkan capaian kegiatan pada tabel di atas, realisasi anggaran tahun 2017 masih memberikan silpa sebesar 113,243,801,392,-. Sehingga diketahui anggaran yang tidak terealisasi sebesar 45,64%. Selain data di atas dapat dilihat daa serapan

anggaran pada laporan realisasi anggaran Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.2.

Sebagai Berikut :

Tabel 1.2
Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2017

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
BELANJA	1,331,926,412,870.00	1,193,461,836,024.00	89,60
BELANJA OPERASI	1,201,510,608,035.90	1,092,539,747,041.00	90,93
Belanja Pegawai	1,083,785,371,137.00	1,085,564,595,683.00	97,67
Belanja Barang dan Jasa	117,725,236,898.90	33,975,151,358.00	28,86
BELANJA MODAL	130,415,804,834.10	100,922,088,983.00	77,38
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45,670,599,870.06	36,213,135,180.00	79,29
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56,680,664,389.04	49,208,061,803.00	86,82
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset tetap Lainnya	28,064,540,575.00	15,500,892,000.00	55,23
SURPLUS/ (DEFISIT)	(1,331,926,412,870.00)	(1,193,461,836,024.00)	89,60
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1,331,926,412,870.00)	(1,193,461,836,024.00)	<u>89,60</u>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kota Bandung TA 2017, Diperoleh November Tahun 2018.

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran belanja dan capaian program pada Dinas Pendidikan Kota Bandung TA 2017 masih belum dikatakan efektif karena realisasi anggarannya tidak mencapai 95%. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang tata cara pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja kementerian Negara/Lembaga, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.02/2015 Pasal

3 Ayat 2. Peraturan tersebut menjelaskan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan kecapaian kinerja penganggaran kementerian Negara/lembaga tahun sebelumnya yaitu :

- a. Persentase penyerapan anggaran paling sedikit 95% (Sembilan puluh lima persen);
- b. Persentase realisasi capaian output paling sedikit 95% (Sembilan puluh lima persen); dan
- c. Laporan keuangan kementerian Negara/lembaga berpredikat wajar tanpa pengecualian.

Pemerintah Kota Bandung menunjuk serta memerintahkan Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk melaksanakan kebijakan pelaksanaan anggaran di Kota Bandung. Namun dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut masih belum berjalan secara efektif dikarenakan daya serap anggaran masih kurang dari 95%, hal ini dikarenakan masih kurangnya komunikasi dan koordinasi antar organisasi. Sedangkan, apabila dinas/lembaga tidak menyerap anggaran paling sedikit 95% maka akan diberikan sanksi yaitu pengurangan pagu belanja pada tahun anggaran berikutnya.

Hal tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.02/2015 Pasal 2, sebagai berikut : Kementerian negara/lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya, dapat dikenakan pemotongan pagu belanja pada tahun anggaran berikutnya, yang selanjutnya disebut dengan sanksi.

Melalui penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan ditahun 2017 ini sangat kurang bahkan akuntabilitasnya pun dapat dikatakan tidak optimal. Hal tersebut menyebabkan diperlukannya tindak lanjut terhadap laporan penilaian atas akuntabilitas publik di Dinas Pendidikan Kota Bandung. Pelaksanaan akuntabilitas publik pada instansi pemerintah sangat diperlukan untuk mengukur apakah dana publik tadi ditetapkan dan telah digunakan secara tepat untuk tujuan. Setelah mengamati program capaian kegiatan tahun anggaran 2017 pada tabel sebelumnya, dapat diketahui bahwa dalam penyusunan dan pengelolaan APBD belum sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga adanya ketidakseimbangan anggaran yang menyebabkan program belum sepenuhnya dilaksanakan.

Berdasarkan fenomena-fenomena, dan data yang telah diperoleh peneliti pada Dinas Pendidikan Kota Bandung, maka peneliti termotivasi untuk meneliti lebih jauh tentang **“Pengaruh Implementasi Kebijakan Tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2017”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Ketidaksesuaian anggaran antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi anggaran. Hal ini dilihat dari realisasi anggaran dan capaian kegiatan program tahun 2017 kurang dari 95%.

2. Keterbatasan data dan informasi
3. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia.
4. Belum optimalnya koordinasi.
5. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/ kegiatan.
6. Perlu peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD, maupun RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dijelaskan, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh standar dan sasaran kebijakan dalam implementasi kebijakan tentang pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/ lembaga terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2017?
2. Seberapa besar pengaruh sumber daya dalam implementasi kebijakan tentang pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/ lembaga terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2017?
3. Seberapa besar pengaruh komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas dalam implementasi kebijakan tentang pelaksanaan anggaran belanja

kementerian negara/ lembaga terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2017?

4. Seberapa besar pengaruh karakteristik agen pelaksana dalam implementasi kebijakan tentang pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/ lembaga terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2017?
5. Seberapa besar pengaruh kondisi sosial, ekonomi, dan politik dalam implementasi kebijakan tentang pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/ lembaga terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2017?
6. Seberapa besar pengaruh disposisi implementor dalam implementasi kebijakan tentang pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/ lembaga terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2017?
7. Seberapa besar pengaruh standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial ekonomi, dan politik serta disposisi implementor dalam implementasi kebijakan tentang pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/ lembaga terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2017.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh standar dan sasaran kebijakan dalam implementasi kebijakan tentang pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/ lembaga terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2017.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sumber daya dalam implementasi kebijakan tentang pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/ lembaga terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2017.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas dalam implementasi kebijakan tentang pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/ lembaga terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2017.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh karakteristik agen pelaksana dalam implementasi kebijakan tentang pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/ lembaga terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2017.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kondisi sosial, ekonomi, dan politik dalam implementasi kebijakan tentang pelaksanaan anggaran belanja

kementerian negara/ lembaga terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2017.

6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh disposisi implementor dalam implementasi kebijakan tentang pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/ lembaga terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2017.
7. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial ekonomi, dan politik serta disposisi implementor dalam implementasi kebijakan tentang pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/ lembaga terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2017.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Dapat memperkaya wawasan pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan implementasi kebijakan tentang pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/ lembaga terhadap akuntabilitas publik.
 - b. Memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti yang tertarik melakukan penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Instansi, hasil penelitian ini dapat digunakan bahan masukan khususnya untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah tentang upaya peningkatan implementasikan kebijakan tentang pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/ lembaga terhadap akuntabilitas publik.
- b. Bagi umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti.

1.6 Kerangka Pemikiran

Berkaitan dengan pembahasan masalah dan pemecahannya diperlukan anggapan dasar yang dijadikan landasan teoritis. Untuk lebih jelasnya peneliti akan mengemukakan landasan teori yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas, sehingga dapat melaksanakan penelitian. Dalam hal pelaksanaan anggaran belanja dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang tata cara pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja kementerian Negara/Lembaga, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.02/2015 Pasal 3 Ayat 2.

Kebijakan tersebut diambil untuk mengatasi persoalan yang terjadi dan memiliki konsekuensi-konsekuensi tersendiri. Meter dan Horn dikutip Mulyadi (2018: 57) Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, “Implementasi Kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang

diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”.

Perlu diketahui bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi. Apabila keenam variabel tersebut dilaksanakan dengan baik maka akan memberikan keberhasilan terhadap implementasi kebijakan. Keenam variabel tersebut, dikemukakan oleh Meter dan Horn dikutip Mulyadi (2018:72) Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Dimensi dari implementasi kebijakan, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan
Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi.
2. Sumber daya
Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas
Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.
4. Karakteristik agen pelaksana
Sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan.
5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik
Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
6. Disposisi Implementor
Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu :

- a. Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan;
- b. Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan.
- c. Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Kemudian untuk mengetahui sejauhmana pengimplementasian sebuah kebijakan maka diperlukan akuntabilitas publik yang diterapkan di setiap daerah. Akuntabilitas publik sangat penting dilakukan sebagai suatu ukuran penyelesaian suatu pekerjaan, karena harus ada penilaian dampak yang dirasakan oleh masyarakat mengenai implementasi kebijakan tersebut positif atau malah banyak menimbulkan masalah.

Mardiasmo (2009:20) Akuntansi Sektor Publik, mengatakan bahwa “akuntabilitas publik sebagai kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut”. Berdasarkan penjelasan tersebut maka akuntabilitas publik menurut Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2009: 21) Akuntansi Sektor Publik, terdapat empat dimensi dari akuntabilitas publik adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum
Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probility*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

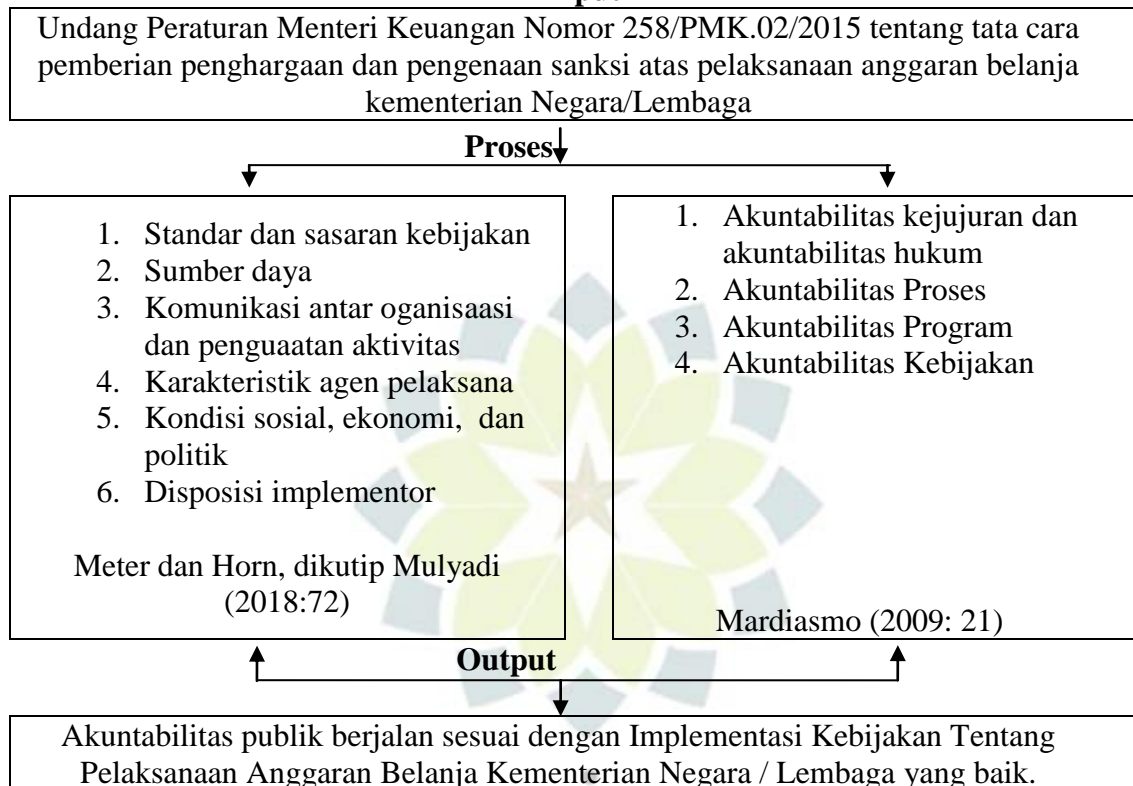
4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Melihat dari pernyataan di atas, maka dengan demikian peneliti berpendapat bahwa Implementasi Kebijakan merupakan langkah penting dalam pengelolaan anggaran, karena Implementasi Kebijakan Tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga yang baik akan menghasilkan akuntabilitas publik yang baik pula. Berikut ini kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 1.1, sebagai berikut:



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran Penelitian
Input



1.7 Hipotesis

Ho Berdasarkan kerangka pemikiran dan teori-teori dari para ahli yang penulis telah dirumuskan diatas, maka dapat ditarik hipotesisnya sebagai berikut:

1. H_0 : Tidak terdapat pengaruh standar dan sasaran kebijakan tentang pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/ lembaga terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2017
- H_a : Terdapat pengaruh positif standar dan sasaran kebijakan tentang pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/ lembaga terhadap

akuntabilitas publik pada Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2017

2. H_0 : Tidak terdapat pengaruh sumber daya kebijakan tentang pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/ lembaga terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2017.

H_a : Terdapat pengaruh positif sumber daya kebijakan tentang pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/ lembaga terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2017?

3. H_0 : Tidak terdapat pengaruh komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas tentang pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/ lembaga terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2017.

H_a : Terdapat pengaruh positif komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas tentang pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/ lembaga terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2017.

4. H_0 : Tidak terdapat pengaruh karakteristik agen pelaksana kebijakan tentang pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/ lembaga terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2017.

H_a : Terdapat pengaruh positif karakteristik agen pelaksana kebijakan tentang pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/ lembaga

terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2017.

5. H_0 : Tidak terdapat pengaruh kondisi sosial, ekonomi, dan politik kebijakan tentang pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/ lembaga terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2017.

H_a : Terdapat pengaruh positif kondisi sosial, ekonomi, dan politik kebijakan tentang pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/ lembaga terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2017.

6. H_0 : Tidak terdapat pengaruh disposisi implementor kebijakan tentang pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/ lembaga terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2017.

H_a : Terdapat pengaruh positif disposisi implementor kebijakan tentang pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/ lembaga terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2017.

7. H_0 : Tidak terdapat pengaruh standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial ekonomi, dan politik serta disposisi implementor kebijakan tentang pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/ lembaga terhadap akuntabilitas publik pada Dinas

Pendidikan Kota Bandung tahun 2017.

H_a : Terdapat pengaruh positif standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial ekonomi, dan politik serta disposisi implementor kebijakan tentang pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/ lembaga terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2017.

Hipotesis nol (H_0) adalah suatu hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Sedangkan hipotesis alternatif (H_a) adalah hipotesis yang menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

